

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### V.1 Kesimpulan

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk melakukan analisis pengaruh tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan daerah pada pusat, *leverage*, dan temuan audit BPK terhadap kinerja keuangan pemda yang terdapat di Pulau Sumatera. Setelah dilakukan beberapa analisis serta pembahasan di bab sebelumnya yang sudah diuraikan dengan lengkap dengan menggunakan pengujian hipotesis terkait variabel yang dipakai dalam penelitian ini, maka kesimpulan yang dapat ditarik sebagai berikut:

1. Tingkat kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kekayaan yang dimiliki oleh suatu daerah yang dapat diinterpretasikan dengan PAD tidak memberikan pengaruh yang efisien terhadap kinerja keuangan pemda. Hal tersebut karena apabila kekayaan daerah meningkat pada tahun berikutnya, kinerja keuangan pada suatu daerah belum tentu meningkat atau menurun dari tahun sebelumnya.
2. Tingkat ketergantungan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemda. Hasil temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan yang diukur dengan DAU dibagi total pendapatan memberikan pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemda. Hal tersebut disebabkan pemerintah pusat sudah mempercayai pemda untuk bertanggungjawab atas dana yang sudah diberikan sehingga suatu pemda akan termotivasi untuk mengelola dana tersebut serta meningkatkan kinerjanya dengan baik.
3. *Leverage* pemda berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemda. Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa *leverage* yang diprosikan dengan *debt to equity ratio (DER)* memberikan pengaruh secara positif terhadap kinerja keuangan pemda. Hal tersebut disebabkan karena adanya pengawasan yang ketat oleh peminjam dana terhadap pemda tersebut membuat pemda meningkatkan kinerja keuangannya serta mengelola agar tidak tingginya *DER* yang didapatkan.

4. Temuan audit BPK tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemda. Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa temuan audit BPK yang dilihat dari ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan ini tidak memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan pemda. Hal ini disebabkan karena temuan audit oleh BPK tidak dapat dilihat hanya dari banyaknya temuan audit berupa ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, akan tetapi juga dapat dilihat dari faktor lain yaitu sistem pengendalian intern.

## V.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka peneliti memiliki beberapa saran yang dapat digunakan di kemudian hari, yaitu sebagai berikut :

### 1. Saran teoritis

Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan menggunakan faktor – faktor lain yang dapat juga mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, seperti ukuran legislatif, opini audit, belanja daerah, pajak dan retribusi daerah. Pengembangan penelitian juga dapat dilakukan dengan menggunakan proksi yang berbeda, entitas pemerintahan lainnya, dan periode sampel penelitian pada rentang waktu yang berbeda untuk menambah ilmu pengetahuan. Hal tersebut dapat membantu ketepatan dan keakuratan dalam penelitian yang akan datang.

### 2. Saran Praktis

Bagi pemerintah daerah khususnya di kabupaten/kota di Pulau Sumatera diharapkan dapat lebih mengoptimalkan pengelolaan kinerja keuangan dengan memperhatikan tingkat kekayaan daerah yang belum merata dan belum optimal pada pemerintah daerahnya. Dan juga dengan memperhatikan temuan audit BPK yang bernilai tinggi agar pemda dapat mengevaluasi hasil temuan tersebut sehingga kinerja keuangan pemda dapat meningkat. Dengan demikian, setiap biaya yang dikeluarkan serta dana yang diterima oleh pemerintahan dapat dimanfaatkan sesuai dengan target dalam pemerintah tersebut untuk meningkatkan kinerja keuangan pemda tersebut sehingga kesejahteraan masyarakat dapat dikatakan baik.